

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TENTANG SISTEM
BAGI HASIL ANTARA PEMILIK KEBUN KARET DAN
PEKERJA SADAP KARET
(Studi di Desa Trikarya Kecamatan Penawartama
Kabupaten Tulang Bawang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh
**EIS JULAIKAH
NPM.1621030456**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TENTANG SISTEM
BAGI HASIL ANTARA PEMILIK KEBUN KARET DAN
PEKERJA SADAP KARET
(Studi di Desa Trikarya Kecamatan Penawartama
Kabupaten Tulang Bawang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Hukum Ekonomi Syari'ah



Pembimbing I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.
Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I, M.EI.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUN
1442 H / 2021 M**

ABSTRAK

Bagi hasil juga terdiri dari banyak bentuk pertanian. Dalam memenuhi kebutuhannya, masyarakat banyak melakukan kerjasama terutama dalam bidang perkebunan karet. Sistem bagi hasil antara pemilik kebun karet dan pekerja sadap karet di Desa Trikarya Akad (perjanjian)nya secara lisan dan tanpa saksi hanya didasari saling percaya dengan tidak menyebutkan batasan waktunya. Dalam akad (perjanjian) ini bagi hasil yang disepakati yaitu 50% : 50% dengan ketentuan biaya perawatan (memberi pupuk) ditanggung bersama, yaitu pemilik kebun karet dan pekerja sadap karet, sedangkan prosentase 40% 60% dengan ketentuan biaya perawatan (memberi pupuk) ditanggung oleh salah satu pihak yaitu pemilik kebun karet saja. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem bagi hasil antara pemilik kebun karet dan pekerja sadap karet di Desa Trikarya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang? Dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang sistem bagi hasil antara pemilik kebun karet dan pekerja sadap karet tersebut? Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem bagi hasil antara pemilik kebun karet dan pekerja sadap karet di Desa Trikarya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang dan untuk menganalisis sistem bagi hasil antara pemilik kebun karet dan pekerja sadap karet tersebut disisi Hukum Ekonomi Syari'ah. Jenis enelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat *Deskriptif analisis* yaitu mencari data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan, sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, kemudian analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berpikir deduktif dan induktif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa sistem bagi hasil antara pemilik kebun karet dan pekerja sadap karet yaitu bagi hasil yang disepakati 50%:50%, ketika harga karet baik (mahal) sedangkan pada saat harga karet jelek (murah) bagi hasil yang disepakati 40% bagi penyadap karet dan 60% bagi pemilik kebun karet, kedua pola prosentase bagi hasil tersebut, si penyadap karet mempunyai kewajiban merawat (memberi pupuk), tetapi dalam prakteknya tidak terpenuhi. Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah sistem bagi hasil tersebut dikenal dengan istilah *musaqoh*, dan itu dibenarkan/boleh (mubah). Hanya ketika penyadap karet tidak memenuhi kewajibannya, maka perjanjian tersebut menjadi fasid (rusak).

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eis Juliaiah
NPM : 1621030456
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun Karet Dan Pekerja Sadap Karet** (Studi di Desa Trikarya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang) adalah benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 31 Maret 2021

Eis Juliaiah
NPM. 1621030456



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TENTANG SISTEM BAGI HASIL ANTARA
PEMILIK KEBUN KARET DAN PEKERJA
SADAP KARET (Studi di Desa Trikarya
Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang
Bawang)**

**Nama : Eis Julaikah
NPM : 1621030456
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Chaidir Nasution, M.H

Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I

NIP. 195802011986031002

NIP. -

**Mengetahui,
Ketua Prodi Muamalah**

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK KEBUN KARET DAN PEKERJA SADAP KARET (Studi di Desa Trikarya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)**, disusun oleh **Eis Julaikah, NPM. 1621030456**, Program Studi: **Hukum Ekonomi Syari'ah**, sudah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Pada Hari/ Tanggal: **Rabu/31 Maret 2021**

TIM PENGUJI:

Ketua : Marwin, S.H., M.H

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I

Penguji I : Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H

Penguji II : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I

**Dekan
Fakultas Syari'ah**

Dr. H. Khairuddin, M.H
NIP.196210221993031002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.
(Q.S Al-Maidah[5]:2)*



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahim

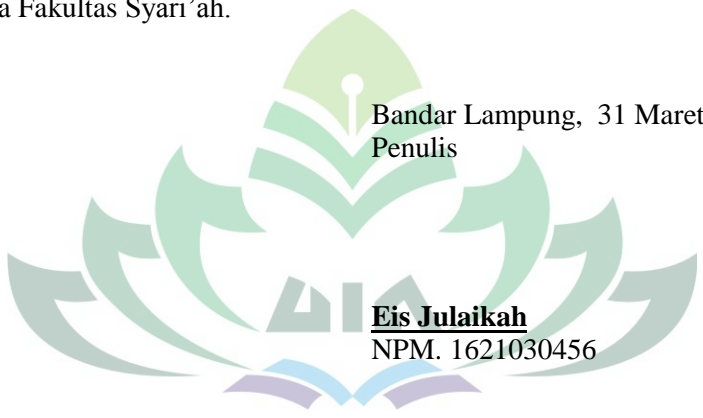
Teriring do'a dan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala limpahan berkah, nikmat, kedamaian, keindahan dan kemudahan dalam menjalani dan memaknai kehidupan ini,serta rasa saayang, restu dan perlindungan-Nya yang selalu mengiringi di setiap hela nafas dan langkah kaki ini. Maka dengan ketulusan hati dan penuh kasih sayang aku persembahkan karya sederhana ini sebagai tanda cinta, sayang dan hormat tak terhingga kepada orang-orang terkasih:

1. Orang yang paling berjasa dalam hidupku kedua orang tuaku, Ayahandaku tercinta Sholikin dan Ibundaku Sri Lestari yang telah membesarkan dan mendidikku serta tak pernah melewatkan Shalat 5 waktunya tanpa mendo'akanku, memberikan semangat tak ada henti-hentinya, mencurahkan kasih sayangnya, memberikan motivasi dan pengorbanan, selalu menyertai langkahku menggapai cita-cita, terimakasih atas segala hal yang kalian berikan, atas untain do'a yang tak pernah henti. Terimakasih yang tak segalanya. Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian dimana pun kalian berada, Amin yarobbal 'alamin.
2. Kakakku tercinta Nining Nurhayati S.pd dan Heri Susanto S.pd Terimakasih atas segala do'a dan motivasi yang selalu menjadi semangat bagi penulis.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Eis Julaikah. Dilahirkan pada tanggal 10 Mei 1998 di Tulang Bawang. Merupakan anak kedua dari buah perkawinan pasangan Bapak Sholikin dan Ibu Sri Lestari .

Penulis mengawali pendidikannya di Sekolah Dasar SD Negeri 2 Trikarya dan selesai pada tahun 2010. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Penawartama pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 1 Penawartama selesai pada tahun 2016. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi, yaitu pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung mengambil Program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah.



Bandar Lampung, 31 Maret 2021
Penulis

Eis Julaikah
NPM. 1621030456

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Karet Pekerja Sadap Karet (Studi di Desa Trikarya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang), ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat serta para pengikut beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan Strata 1 (SI) di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Syari’ah).

Atas terselesainya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara terinci ungkapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag., Selaku Rektor UIN RadenIntan Lampung;
2. Bapak Dr. Khairuddin, M.H., Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN RadenIntan Lampung;
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung;
4. Bapak Drs. Chaidir Nasution, M.H., Selaku Pembimbing I yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi;
5. Ibu Herlina Kurniati, S.H.I, M.E.I., selaku Pembimbing II yang selama ini dengan tulus telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memotivasi sehingga skripsi ini terselesaikan.
6. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah UIN RadenIntan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, khususnya jurusanMuamalah.

7. Pemilik kebun karet dan pekerja sadap karet yang telah bersedia menjadi narasumber untuk perlengkapan data dalam skripsi ini.
8. Rekan-rekan satu angkatan tahun 2016 Fakultas Syariah khususnya Muamalah I yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Sahabat-sahabat terdekatku Anisha Resti Pratiwi, Arsela Akma, Fika Umi Ulfiah, Helma Wati, Karmila Asmawati, Nur Winda, Siti Jauharoh.
10. Teman-teman kontrakan Sewa Rumah Permata 01 Dina Lestari, Erma yanti, Miftahul janah, Siti Nurhassanah.
11. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 31 Maret 2021
Penulis

Eis Julaikah
NPM. 1621030456



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	2
D. Fokus Penelitian.....	4
E. Rumusan Masalah.....	4
F. Tujuan Penelitian	5
G. Metode Penelitian	5

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Menurut Hukum Islam	9
1. Pengertian dan Dasar Hukum	9
2. Rukun dan Syarat.....	13
3. Macam-Macam Akad	18
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak	19
5. Berakhirnya Akad.....	22
B. Musaqoh Menurut Hukum Islam	26
1. Pengertian dan Dasar Hukum	26
2. Rukun dan Syarat Musaqoh.....	39
3. Hikmah Musaqoh	41
4. berakhirnya Musaqoh	43
C. Penjadapan Pohon Karet.....	43
D. Tinjauan Pustaka.....	44

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Trikarya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang	47
1. Sejarah berdirinya Desa Trikarya.....	47
2. Keadaan Geografis Desa Trikarya	47
3. Keadaan Demografis Desa Trikarya	48
B. Sistem Bagi Hasil (<i>Musaqoh</i>) antara Pemilik Kebun Karet dan Pekerja Sadap Karet di Desa Trikarya	53

BAB IV ANALISIS DATA

A. Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun Karet dan Pekerja Sadap Karet di Desa Trikarya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang	57
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun Karet Dan Pekerja Sadap Karet.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Rekomendasi.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Penduduk	48
2. Tingkat Pendidikan	48
3. Tingkat Sarana dan Prasarana Kampung	49
4. Tingkat Ekonomi Masyarakat KK/Jiwa.....	49
5. Jumlah Mata Pencaharian Penduduk	49
6. Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	50
7. Prasarana dan Sarana Kampung.....	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam menjalani skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan maksud dari istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi interpretasi terhadap pemaknaan judul dari berbagai istilah yang digunakan, disamping langkah ini merupakan sistem penajaman terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun Karet dan Pekerja Sadap Karet (Studi Kasus di Desa Trikarya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang). Istilah yang secara dramatikal diuraikan sebagai berikut:

1. Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum Ekonomi Syari'ah adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.¹

2. Sistem

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas dan sebagainya.²

3. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pemilik lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.³

¹Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid 1*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 1997), h. 5

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1250.

³Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2001), h. 96.

4. Pekerja Sadap Karet

Pekerja Sadap Karet adalah orang yang bekerja untuk menyadap karet milik orang lain dengan mendapat atau menerima upah atas hasil kerjanya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa judul proposal ini adalah Bagaimana Sistem bagi hasil antara pemilik dengan Pekerja Sadap Karet yang terjadi di Desa Trikarya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang menurut pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis tertarik dalam memilih menentukan judul tersebut adalah:

1. Secara Objektif

- a. Pemilik kebun karet di Desa Trikarya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang pada umumnya melakukan bagi hasil pengupahan untuk menyadap getah/karet.
- b. Perjanjian bagi hasil biasanya dilakukan secara lisan (tidak tertulis), tidak jelas jangka waktunya, sehingga sewaktu-waktu dapat berubah.

2. Secara Subyektif

Bagi penulis penelitian ini memiliki banyak referensi pendukung yang dapat mempermudah dalam menyelesaikan skripsi ini kedepannya, seperti adanya buku yang membahas tentang bagi hasil selain itu dari tempat penelitian yang terjangkau oleh penulis serta pembahasan dalam penelitian skripsi ini sesuai dengan jurusan yang diambil oleh penulis yaitu Hukum Ekonomi Syari'ah.

C. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau keperluan-keperluan lain, tidak bisa diabaikan. Kenyataannya menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia ada yang mampu berusaha secara

produktif namun tidak memiliki modal, dan ada pula yang memiliki modal dan tidak bisa produksi produktif tetapi juga berusaha berkeinginan membentu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Bagi hasil juga terdiri dari banyak bentuk pertanian. Dalam memenuhi kebutuhannya, masyarakat banyak melakukan kerjasama terutama dalam bidang pertanian. Masyarakat menganggap bahwa dengan adanya kerjasama bagi hasil tersebut mampu meringankan beban ekonomi mereka. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah adalah *musaqoh*. *Musaqoh* yang berarti kerjasama antara pihak pemilik kebun karet dan penyadap karet dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa hasil itu merupakan hak bersama antara pemilik kebun karet dan pekerja sadap karet sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Kerja sama dalam bentuk *musaqoh* menurut kebanyakan ulama Fiqh hukumnya mubah (boleh) bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam.

Praktik kerjasama pada perkebunan karet yang diterapkan oleh masyarakat Trikarya adalah dengan sistem bagi hasil dimana dalam transaksi tersebut pemilik kebun karet menyerahkan lahannya kepada pekerja sadap karet dengan perjanjian pembagian hasil dimana pekerja sadap karet dan pemilik kebun karet mendapatkan sama rata yaitu 50% untuk pemilik kebun karet dan 50% untuk pekerja sadap karet. Pemilik kebun karet mengeluarkan modal seperti biaya perawatan dan pekerja sadap karet hanya mengeluarkan tenaga saja. Alasan pembagian hasil yang sama karena pemilik kebun karet tidak bisa menyadap sendiri dikarenakan sibuk dengan aktivitas lain dan harga karet yang masih murah dan juga agar mendapatkan hasil. Misalnya sebidang kebun karet dengan luas 3 hektare mendapatkan hasil getah karetnya dalam seminggu sebanyak 100 kg dengan harga jual Rp 5.000 sehingga memperoleh hasil Rp 500.000 berarti pekerja sadap karet mendapatkan uang sebesar Rp 250.000 dan pemilik kebun karet mendapatkan uang Rp 250.000. Demikian halnya bagi hasil

penyadapn karet di Desa Trikarya dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak dan menurut kebiasaan setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa adanya saksi dan prosedur hukum yang mendukung, pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadinya kerjasama kedua belah pihak.

Dalam Muamalah, prinsip kerjasama salah satunya adalah keadilan. Keadilan dalam kerjasama ini adalah bagaimana para pelaku merasa saling menguntungkan satu sama lain. Adil adalah nilai-nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan sosial dan nilai-nilai adil ini pusat orientasi dalam interaksi antar manusia. Jika keadilan ini dilanggar, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam pergaulan hidup. Sebab suatu pihak akan dirugikan atau disengsarakan, walaupun yang lain memperoleh keuntungan, akan tetapi keuntungan ini hanya bersifat sementara saja. Jika sistem rusak karena keadilan telah dilanggar, karena seluruh masyarakat akan mengalami kerusakan yang dampaknya akan menimpa semua orang, maka keadilan dalam kerjasama pada perkebunan karet harus berdampak kepada masyarakat yang bersangkutan yaitu dengan menjunjung nilai keadilan dalam bertransaksi.

Penulis Tertarik untuk meneliti lebih lanjut serta membahas bagaiman asistem bagi hasil perkebunan karet dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah tentang Sistem Bagi Hasil antara Pemilik Kebun Karet dan Pekerja Sadap Karet”**.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan maka focus penelitian ini adalah sebuah kajian yang akan memfokuskan pada sistem pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan pemilik kebun karet pada pekerja sadap dari bagian tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah tentang status hukumnya.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana system bagi hasil antara pemilik kebun karet dan pekerja sadapkaret di Desa Trikarya Kecamatan penawartama Kabupaten Tulang Bawang?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang system bagi hasil antara pemilik kebun karet dan pekerja sadap karet tersebut?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil antara pemilik kebun karet dan pekerja sadap karet di Desa Trikarya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem bagi hasil antara pemilik kebun karet dan pekerja sadap karet dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atau topik, gejala, atau isu tertentu.

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik dilembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah).

Dalam penelitian ini dilakukan di Desa Trikarya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang. Di samping itu juga metode penelitian dalam proposal ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang setelah memaparkan dan melaporkan suatu keadaan, objek, gejala, kebiasaan, perilaku tertentu kemudian dianalisis secara lebih kritis. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana sistem bagi hasil antara pemilik dengan pekerja sadap karet di Desa Trikarya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama atau objek yang diteliti. Adapun yang menjadi data sumber primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian yaitu Desa Trikarya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan dalam kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji. Sumber data sekunder yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah beberapa sumber yang relevan antara lain: Al-Qur'an, hadis, buku-buku, kitab-kitab fiqh, dan literatur-literatur lain yang mendukung.

3. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.⁴ Berdasarkan teori suharsimi Arikunto apabila populasi kurang dari seratus lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan

⁴Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 81.

penelitian populasi, tetapi jika jumlah populasi besar, dapat diambil antara 10-15% atau 15-20% atau lebih.⁵Berdasarkan dari teori ini maka jumlah populasi kurang dari 100 maka diambil keseluruhan, sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi. Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari 6 orang yaitu 2 orang sebagai pemilik kebun karet dan 4 orang sebagai pekerja sadap karet.

4. Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁶Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu pihak yang terkait, yaitu pemilik kebun karet dan pekerja sadap karet di Desa Trikarya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable atau berupa catatan, surat perjanjian dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara tidak langsung untuk mendapat terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuat laporan.

5. Pengolahan Data

a. *Editing*

Editing adalah kegiatan memeriksa kembali data yang diperoleh peneliti ini merupakan kegiatan meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya atau tidak.

b. *Coding*

Coding adalah proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut criteria dan macam yang ditetapkan.

⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 134.

⁶*Ibid.*, h. 83.

c. *Sistematizing*

Sistematizing adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Pada penelitian ini penulis melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, tersusun, dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.

6. Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Metode berpikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum menjadi kebiasaan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam gambaran umum proses sistem bagi hasil pekerja sadap karet melalui penelaahan dari gambaran umum tersebut berusaha menemukan kesimpulan yang bersifat khusus.⁷

Selain menggunakan metode deduktif, penulis juga menggunakan metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditentukan generalisasi yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan sistem bagihasil pemilik kebunkaret dengan pekerja sadap karet.

⁷Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h.

BAB II PEMBAHASAN

A. Akad

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Akad berasal dari bahasa arab *al-'aqad* yang artinya perikatan, perjanjian, dan permufakatan.¹ Pertalian ijab qabul (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan.

Menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti, antara lain:²

- a. Mengikat, (*ar-Aabtu*) yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan, (*Aqdatun*) yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji, (*al-ahdu*) yaitu siapa saja yang menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa.

Istilah *ahdu* dalam al-Qur'an mengacu pada pernyataan seorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membantunya.³

Akad dalam hukum Islam diartikan sebagai ikatan antara para pihak dalam melakukan suatu hubungan dua arah. Hubungan ini dapat berlaku untuk keperluan materi berupa

¹ Nasrun Haron, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Grafindo Persada Pratama, 2007), h. 97.

²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Fiqih Muamalah) (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), h. 101.

³Sohari Ru'fah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor:PT Raja Grafindo Persada, 1979), h. 42.

benda yang bergerak maupun tidak. Atau pun dapat berupa jasa yang diukur dengan kebiasaan yang terjadi dimasyarakat tertentu atau dapat juga berupa pemberian (hadiah). Karena itu dalam hukum islam konsep akad tidak hanya berlaku secara dua pihak melainkan dapat juga berlaku secara sepihak.⁴

Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.⁵

Pengertian akad menurut istilah, ada beberapa pendapat diantaranya adalah menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-Islami wa adilatuh* yang dikutip oleh Damyauddin bahwa akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan kabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu.⁶

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.⁷

Sedangkan menurut para ahli, akad didefinisikan sebagai berikut:

a. Muhammad Aziz Hakim

Beliau mengemukakan bahwa akad adalah gabungan atau penyatuan dari penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) yang sah sesuai dengan hukum Islam. Ijab adalah penawaran dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah

⁴ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah* (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya), (Banda Aceh:PeNa, 2014), h. 21.

⁵Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta:Darul Haq, 2008), h. 26.

⁶Eka Nuraini Rachmawati & Nab Mumin Bin Ab Ghani, *Akad Jual Beli dalam Perspektif Fiqh dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia* *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, (Desember, 2015), h. 786.

⁷*Ibid.*, h. 155.

penerimaan dari penawaran yang disebutkan oleh pihak pertama.⁸

b. Ghufron A. Mas' adi

Mengemukakan bahwa akad adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya berambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu dan kokoh.⁹

c. Hasbi Ash Shiddieqy

Mengemukakan bahwa akad adalah perikatan antara ijab dan Qabul secara dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.

d. Zainal Abdulhaq

Mengemukakan bahwa akad adalah membuat suatu ikatan atau kesepakatan antara pihak pertama (penjual) dengan pihak kedua (pembeli) terhadap pembelian suatu barang atau produk yang dibenarkan oleh ketentuan hukum syar'i.¹⁰

e. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹¹

Adapun akad menurut syar'i yaitu hubungan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibolehkan oleh syari'at yang mempunyai pengaruh secara langsung. Ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan ijab dan qabul.¹² Akad merupakan perjanjian antara kedua belah pihak yang berakad dimasa yang akan datang

⁸Muhammad Aziz Hakim, *Cara Praktis Memahami Transaksi dalam Islam*, (Jakarta:Pustaka Hidayah, 1996), h. 192.

⁹Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), h. 192.

¹⁰Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih*, (Jakarta:Bulan Bintang, 1992), h. 21.

¹¹Zinal AbdulHaq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Pustaka Amani, 2002), h. 76.

¹²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah, 2010), h. 17.

karena masing-masing pihak memenuhi hak dan kewajibannya.¹³ Secara umum yang dimaksud dengan akad adalah setiap yang mengandung tekad seseorang untuk melakukan sesuatu. Baik tekad tersebut dari pihak, maupun adanya respon dari pihak lain yang memiliki kehendak sama, yang menunjukkan keinginan kuat untuk melakukan akad.¹⁴

Adapun yang menjadi dasar hukum suatu akad yaitu firman-firman yang tertera di dalam ayat suci Al-Qur'an di dalam surat al-maidah ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۚ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَيِّمَةٌ اَلَّا تَعْمُرُوْا مَا يَتٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

15 

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.(Q.S Al-Maidah:1).

Selanjutnya yang menjadi dasar hukum suatu akad yaitu Q.S Al-Imran ayat 76 yang berbunyi:

ۚ بَلٰى مَنْ اَوْفٰ بِعَهْدِهٖ وَاَتَقٰۤى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ

Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (Q.S Al-Imran:76).

¹³Ruslan Abdul Ghofur, "Akibat Hukum dan Terminasi Akad dalam Fiqh Muamalah", *Jurnal ASAS*, Vol. 2, No. 2 (Juli 2010), h. 2.

¹⁴Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung:Remaja Rosdakarya Offset, 2016), h. 7.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung:Fitrah Rabbani, 2009), h. 106.

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung:Fitrah Rabbani, 2009), h. 50.

Selanjutnya Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 58 yang berbunyi:

وَأِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا

تُحِبُّ الْخَائِبِينَ ۚ¹⁷

Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalilah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. (Q.S Al-Anfal:58)

Berdasarkan beberapa uraian mengenai akad di atas maka dapat disimpulkan akad adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang yang berakad dimana bertemunya pernyataan merelakan (ijab) dengan pernyataan menerima kepemilikan (qabul) dalam suatu kerjasama atau kesepakatan antara dua orang atau lebih agar terhindar dari suatu ikatan yang tidak sesuai dengan ketentuan syara'.¹⁸

2. Rukun dan Syarat

a. Rukun

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan iltizam yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut:

1) Aqid

Aqid adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh aqid, antara lain:¹⁹

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung:Fitrah Rabbani, 2009), h. 177.

¹⁸Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2001), h. 45.

¹⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 145.

a) *Ahliyah* (Kompetensi),

Ahliyah (Kompetensi) yaitu bisa melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai pelaku akad. Ada dua jenis kompetensi: pertama, *Ahliyah Wujuh*, yaitu pelaku akad berkompeten untuk menunaikan kewajiban dan mendapatkan hak. Kedua, *Ahliyyatul 'ada*, yaitu pelaku akad berkompeten untuk melaksanakan transaksi secara benar sesuai syari'at. keduanya memiliki kecakapan dan keputusan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayyiz dan berakal. Berkal disini ialah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan-ucapan orang normal. Sedangkan *muwayyiz* disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan atara merugikan dan menguntungkan.

b) *Wilayah*, wilayah adalah kewenangan untuk melakukan transaksi (dengan segala konsekuensi hukumnya) menurut *syar'i*. Wilayah dalam arti bahasa adalah menguasai persolan dan melaksanakannya. Menurut istilah syara' wilayah adalah suatu keharusan yang diberikan oleh syara' yang memungkinkan si pemiliknya untuk menimbulkan akad-akad dan *tassaruf* (ucapan) dan melaksanakannya, yakni akibat-akibat hukum yang timbul karenanya.²⁰

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa wilayah adalah kekuasaan yang diberikan oleh syara' kepada seseorang yang memungkinkannya untuk melakukan akad-akad atas nama dirinya maupun atas nama orang lain yang ada di bawah perwaliannya. Kekuasaan atas nama oreang lain diberikan karena orang yang berhak melakukan akad kecakapannya tidak sempurna, misal masih di abawah umur.²¹

²⁰ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, h. 33.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah, 2017), h. 116-

2) *Ma' uqud 'alaih* (objek akad)

Objek akad yaitu harga atau barang yang menjadi objek transaksi. Objek akad harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Barang yang *Masyru'* (legal)

Barang yang dijadikan akad harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah dijadikan objek, yaitu harta yang dimiliki serta halal untuk dimanfaatkan. Syarat ini disepakati oleh seluruh ulama dan berlaku dalam akad *mu'awadhat* (bisnis) dan akad *tabarru'* (sosial).

b) Objek yang dapat diserahkan terimakan

Objek akad harus dapat diserahkan ketika terjadi akad. Seluruh ulama sepakat bahwa syarat ini berlaku dalam akad-akad *mu'awadhah*. Menurut Imam Malik juga berlaku dalam akad *tabarru'*. Namun Imam Malik juga membolehkan dijadikannya objek akad dalam akad *tabarru'* terhadap barang-barang yang sulit diserahkan pada saat berlangsungnya akad, misalnya menghibahkan kerbau yang sedang lepas.²²

c) Jelas diketahui para pihak

Barang yang dijadikan objek akad harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara keduanya. Apabila barang tersebut tidak diketahui, maka akad menjadi batal. Untuk mengetahui bisa dilakukan berbagai cara, misalnya dengan menunjukkan barangnya apabila ada ditempat akad, dengan dilihat atau ditunjukkan, atau menyebutkan sifat dan ciri-ciri khas dari barang tersebut.

3) *Maudhu' al- 'aqad* (Tujuan Akad)

Tujuan akad itu jelas dan diakui syara'. Tujuan akad ini terkait erat dengan berbagai bentuk akad yang dilakukan. Oleh sebab itu, apabila tujuan suatu akad

²² Ahmad Wardi Muslich, h. 129.

berbeda dsengan tujuan aslinya, itu menjadi tidak sah. Tujuan setiap akad, menurut ulama Fiqh, hanya diketahui melalui *syara'* dan harus sejalan dengan kehendak *syara'*. Atas dasar itu, seluruh akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan kehendak *syara'*, hukumnya tidak sah, seperti berbagai akad yang menghalalkan *riba'*.

Jadi motif bertransaksi itu berbeda-beda dalam satu akad, tetapi target akad itu tidak berbeda dan berlaku dalam suatu akad. Semua bentuk akad yang tujuannya bertentangan dengan *syara'* (hukum Islam), adalah tidak sah dan karena itu tidak menimbulkan akibat hukum. Akibat-akibat hukum itu terjadi atau tercapai segera setelah kontrak dilakukan apabila sayarat-syarat yang diperlukan telah terpenuhi.

- 4) *Siqhat al-'aqad* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *sight al-aqd* ialah:²³

- a) *Sight al-'aqad* harus jelas pengertiannya, kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak banyak memiliki banyak pengertian.
- b) Harus sesuai antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadz.
- c) Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yangb bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling ridha.

b. Syarat

Setiap pembentuk aqad atau akad syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat

²³Sohari Sahari, *Fiqih Muamala*, (Bogor:Ghalia Indonesia), 2011), h. 43.

umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad yaitu.²⁴

- 1) Kedua orang tua yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (mahjur) karena boros atau lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan akid yang memiliki barang.
- 4) Akad tidak dilarang oleh syara'.
- 5) Akad dapat memberikan faedah.
- 6) Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Ijab dan qabul bersambung jika berpisah sebelum adanya qabul maka batal.

Di samping rukun, syarat akad juga harus dipenuhi agar akad itu sah.

Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a) Syarat adanya akad adalah sesuatu yang harus ada agar keberadaan suatu akad diakui *syara'*, syarat ini terbagi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum ada tiga, yaitu: (1) *Sighat* (ijab qabul), objek akad (*ma'uqud 'alaih*), dan pihak yang berakad (*Aqidain*). (2) Akad yang tidak mengandung unsur khilaf atau pertentangan, dilakukan di bawah *ikrah* (paksaan), *tagrir* (penipuan) dan *gubn* (penyamaran). (3) Akad itu harus bermanfaat. Adapun syarat-syarat khusus adanya sebuah akad seperti adanya saksi dalam akad.
- b) Syarat sah akad. Secara umum, para fuqaha menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapat limahal perusak sahya (mufsid) dalam akad, yaitu ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-jilalah*), adanya paksaan (*ikrah*),

²⁴Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 44.

membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauqif*), terdapat unsur tipuan (*gharar*), terhadap bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).²⁵

3. Macam- Macam Akad

Akad banyak macamnya dan berlainan nama serta hukumnya, lantaran berlainan objeknya. Hukum islam sendiri telah memberikan nama-nama itu untuk membedakan satu dengan yang lain. Para ulama fiqih mengemukakan bahwa akad itu dapat dilihat dari beberapa segi. Berikut ini akan diuraikan akad dilihat dari segi keabsahan menurut syara'.

a Akad Shahih

Akad shahih merupakan akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad. Akad shahih ini dibagi oleh ulama Hanafiah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Akad *Nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *Mauquf* yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu. Seperti akad yang dilakukan oleh anak yang muwayyiz.

b Akad Tidak Shahih

Akad tidak shahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama hanafiah membagi akad shahih ini menjadi dua macam, yaitu: aqad batil dan aqad *fasid*. Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Sedangkan aqad *fasid* menurut mereka adalah

²⁵ Mardani, h. 74.

suatu akad yang pada syaratnya diisyaratkan, tetapi sifat yang diadakan itu tidak jelas.²⁶

Dalam kitab-kitab Fiqh terdapat banyak bentuk-bentuk akad, yaitu sebagai berikut:

a. Akad *Munjiz*

Akad *Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad adalah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.

b. Akad *Mu'alaq*

Akad *Mu'alaq* yaitu akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.

c. Akad *Mudhaf*

Akad *Mudhaf* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang mengenai penanggulangan pelaksanaan akad pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tiba waktu yang ditentukan.²⁷

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban dalam islam merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, merupakan dua sisi yang menyatu, dimana ada hak disana ada kewajiban yang melekat pada sisi sebaliknya. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang universal, merupakan satu ciptaan yang maha sempurna.

Hak mempunyai pengertian sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antar manusia baik yang berkaitan dengan perorangan maupun harta benda. Hak merupakan kewenangan

²⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adilatuhu*, (Beirut:Daar Al-Fikr, 1984), h. 231.

²⁷Hendi Suhendi, h. 50-51.

atau kekuasaan atas sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain.²⁸

Kewajiban adalah syarat atau hal-hal yang harus dilakukan oleh manusia sebelum ia mendapatkan haknya. Jika kewajiban ditinggalkan, maka manusia akan berdosa, karena kewajiban pasti akan berdampak pada terhalangnya hak orang lain.²⁹

Dalam hukum islam terdapat asas-asas dari suatu kontrak (perjanjian). Asas ini berpengaruh pada status akad. Ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya kontrak/perjanjian yang dibuat. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:³⁰

a. *Al-Hurriyah* (Kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar hukum islam dan merupakan prinsip dasar dari hukum perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (Freedom Of Making Contract); baik dari segi diperjanjikan maupun menentukan syarat-syarat lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan menentukan persyaratan ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan syari'at islam.

b. *Al-Musawah* (Kesetaraan)

Asas ini memberi landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dan lainnya. Sehingga pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas kesetaraan.

c. *Al-'Adalah* (Keadilan)

Keadilan adalah salah satu sifat tuhan, dan Al-Qur'an menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral. Pelaksanaan asas ini dalam akad dimana para

²⁸Ghufron Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), h. 31-32.

²⁹Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 120.

³⁰<http://alienariez.blogspot.co.id/2013/06/hak-dan-kewajiban-pihak-yang-berakad.html> (26September 2020).

pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

d. *Ar-Ridha* (Kerelaan)

Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, hal ini sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi.

e. *Ash-Shidq* (Kejujuran)

Kejujuran adalah nilai estetika yang mendasar dalam islam. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apa pun. Nilai kejujuran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan.

f. *Al-Kitabah* (Tertulis)

Akad harus dilakukan dengan melakukan kitabah (Penulisan Perjanjian), terutama transaksi dalam bentuk kredit. Di samping itu perlu ada pihak saksi (Syahadah), Rahn (Gadai untuk kasus tertentu) dan prinsip tanggung jawab individu.

Sedangkan unsur-unsur hak dan kewajiban yaitu:³¹

- a. Ijab dan qabul, Ijab qabul harus jelas, selaras dan tidak terhalang sesuatu yang menyebabkan kaburnya atau terganggunya kontrak. Ijab qabul bisa dilakukan dengan lisan, tulisan, isyarat, bahkan dengan perbuatan.
- b. Pelaku Kontrak (*'aqidain*). Pelaku kontrak disyaratkan telah berakal, baligh, bahkan untuk transaksi ekonomi tertentu pelaku harus cerdas (*rusyd*) serta memiliki wewenang terhadap objek kontrak.
- c. Objek akad (*Ma'qud 'alaih*). Objek kontrak secara umum harus ada/terwujud ketika terjadinya kontrak, tidak dilarang hukum islam dan dapat diserahkan ketika kontrak terjadi. Dikecualikan dalam hal jual beli salam, *istishna'* dan ijarah, karena pertimbangan maslahat dan telah menjadi urf.

³¹*Ibid.*,

- d. Akibat hukum kontrak (*Maudhu' 'aqd*). Harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

5. Berakhirnya Akad

Dalam Fikih ditemukan konsep berakhirnya akad melalui dua kategori yaitu:

Pertama, akad telah berakhir secara sempurna. Dalam bentuk akad seperti ini maka akad dapat berakhir dengan sempurna secara penuh dan sempurna tidak secara penuh. Untuk akad yang sempurna secara penuh dikenal dengan istilah doktrin *al-ifa'* yaitu akad telah sempurna dilaksanakan dan para pihak secara terbuka telah menerimanya serta ditemukan lagi usaha-usaha untuk menarik diri dari akad karena akad telah berakhir.

Sedangkan yang kedua yaitu akad yang berakhir yang belum secara seluruhnya sempurna, umumnya akad seperti ini akad yang salah satu dari objeknya belum sempurna seperti akad yang bersifat tangguh artinya harga (uang) atau objek (benda) belum diterima walaupun akad telah sempurna.³²

Berakhirnya akad dapat terjadi karena adanya *fasakh*, yaitu pihak-pihak akad sepakat membatalkan akad, kemudian karena adanya *infasakh* yaitu membatalkan akad karena adanya sebab-sebab darurat.

a. Berakhirnya akad dengan *fasakh*

Pembatalan akad kadang terjadi secara total, dalam arti mengabaikan apa yang sudah disepakati, seperti dalam khiyar, dan kadang-kadang dengan menetapkan batas waktu ke depan, seperti dalam *ijarah* (sewa-menyewa) dan *qardh* (utang piutang). Inilah arti *fasakh* dalam pengertian umum.³³

Pemutusan kontrak (*fasakh*) kontrak disini adalah “melepaskan perikatan kontrak” atau menghilangkan atau menghapuskan hukum kontrak secara total sewakan-akan kontrak tidak akan pernah terjadi”.

³² Ibid, h. 49.

³³ Ahmad Wardi Muslih, h. 166.

Dengan *fasakh*, para pihak yang berkontrak kembali ke status semula sebelum kontrak terjadi. Demikian pula objek kontrak. Pemutusan kontrak dapat terjadi atas dasar kerelaan (*al-taradhi*) para pihak dan dapat pula terjadi secara paksa atau dasar putusan hakim (*al-qadhai*).

Fasakh adakalanya wajib dan ada kalanya jaiz (boleh). *Fasakh* wajib dilakukan dalam rangka menghormati ketentuan syari'ah, misalnya *fasakh* terhadap kontrak yang *fasid*. Dalam hal ini *fasakh*, dilakukan guna menghilangkan penyebab ke-*fasid* kontrak, menghormati ketentuan-ketentuan syari'ah, melindungi ketentuan (*mashlahah*) umum maupun khusus, menghilangkan dharar (bahaya, kerugian), dan menghindari perselisihan akibat pelanggaran terhadap syarat-syarat yang ditetapkan syari'ah. Sedangkan *fasakh* yang jaiz adalah *fasakh* yang dilakukan atas dasar keinginan pihak-pihak yang berkontrak, misalnya *fasakh* yang disebabkan karena adanya hak *khiyar* dan *fasakh* yang didasarkan atas kerelaan kesepakatan seperti iqalah.

Fasakh terjadi karena hal-hal berikut:

1) Akad yang tidak lazim (*jaiz*)

Akad tidak lazim (*jaiz*) adalah akad yang memungkinkan pihak-pihak akad untuk membatalkan akad walaupun tanpa persetujuan pihak akad yang lain, selama tidak terkait hak orang lain. Tetapi jika pembatalan ini merugikan pihak lain (mitra akad) dan *melanggar* kesepakatan, maka tidak boleh di *fasakh*.

2) *Khiyar*

Bagi pihak akad yang memiliki hak *khiyar* baik *khiyar syart*, *khiyar 'aib*, *khiyar ru'yah* maupun lainnya itu bisa memilih antara melanjutkan akad atau membatalkan akad. Jika pilihannya adalah membatalkan akad, maka akadnya adalah *fasakh*. *Fasakh* tersebut dilakukan tanpa memerlukan pihak lain, kecuali dalam *khiyar 'aib*. Pada *khiyar aib*, kalau sudah serahterima menurut Hanafiyah tidak boleh memfasakhkan akad, melainkan atas kerelaan atau berdasarkan keputusan hakim.

3) *Iqalah*

Iqalah adalah kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad yang telah disepakati. Biasanya *iqalah* dilakukan karena salah satu pihak menyesal dan ingin mencabut kembali kontrak yang telah dilakukannya. *Iqalah* dianjurkan oleh Nabi SAW. Akad-akad lazim yang tidak ada *khiyar* –nya menjadi *fasakh* (batal) dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak karena akad itu timbul atas keinginan dan ridha kedua belah pihak, maka akad itu tidak bisa berakhir kecuali dengan ridha mereka. Jadi dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad, maka akadnya berakhir.³⁴

4) Jatuh tempo

Fasakh karena jatuh tempo (habisnya waktu akad) atau terwujudnya tujuan akad. Akad *fasakh* dan berakhir dengan sendirinya karena habisnya waktu akad atau telah terwujudnya tujuan akad, seperti akad *ijarah* berakhir dengan habisnya waktu sewa.³⁵

5) 'Uyub Ridha (Cacat Ridha)

Akad juga bisa *difasakh* jika salah satu pihak tidak ridha, seperti ketika terjadi *tadlis* (penipuan), *ghoban*, *galath* (kekeliruan). Maka pihak yang dirugikan itu memiliki hak untuk mem-*fasakh* akad atau melanjutkannya. Jika yang dipilih adalah *fasakh* maka akad yang disepakatai itu telah berakhir.

Pada praktiknya, *fasakh* yang dilakukan karena cacat ridha itu harus dengan kesepakatan dalam akad (*khiyar 'aib*). Sebuah kontrak boleh dilakukan *fasakh* apabila terpenuhi syarat-syarat berikut:

Kontrak yang akan *difasakh* harus bersifat mnegikat kedua belah pihak, yaitu kontrak yang berbentuk pertukaran (*mu'awadhah*); pihak yang

³⁴ Rozalinda, h. 61.

³⁵ *Ibid.*,

berkontrak melanggar atau tidak dapat memenuhi syarat yang diterapkan dalam kontrak. Jika salah satu pihak melanggar syarat atau ketentuan kontrak yang telah disepakati atau tidak dapat memenuhi kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan kontrak; dalam kontrak tidak dipenuhi unsur kerelaan. Jika salah satu pihak tidak rela dengan cacat yang terdapat pada objek kontrak atau kesalahannya untuk melakukan kontrak tidak terpenuhi secara maksimal, misalnya disebabkan terjadi kekeliruan (*galath*), pemaksaan (*ikrah*) dan penipuan (*tadlis*), ia memiliki hak untuk meminta agar kontrak difasakh, baik atas dasar kerelaan pihak yang lain maupun melalui putusan hakim.³⁶

b. Berakhirnya akad dengan *Infasakh*

Infasakh yakni putus dengan sendirinya (dinyatakan putus, putus demi hukum. Sebuah kontrak dinyatakan putus apabila isi kontrak tidak mungkin dapat dilaksanakan (*istihalah al-tanfidz*) disebabkan *afat samawiyah* (*force majeure*).

Infasakh terjadi karena hal-hal berikut:

1) Selesai masa kontrak

Akad berakhir dengan masa kontrak. Jadi waktu yang ditentukan tersebut berakhir atau tujuan akadnya tercapai, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

2) Kontrak tidak mungkin dilanjutkan

Kontrak berakhir ketika akad tidak mungkin dilanjutkan, misalnya dalam objek jual beli rusak ditangan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli. Maka akad tidak mungkin dilanjutkan, akad tersebut akan berakhir dengan sendirinya.

3) Pelaku akad meninggal dunia

Akad berakhir dengan meninggalnya salah satu atau pihak-pihak akad, maka akad itu dengan sendirinyaberakhir.

³⁶ *Ibid.*, h. 189.

4) Akad yang *fasid*

Akad yang *fasid* itu bisa difasakh oleh kedua belah pihak atau oleh pengadilan untuk menghindari *fasid* dalam akad. Jadi, jika ada akad yang *fasid*, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.³⁷

Akad akan berakhir apabila:

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika: (a) jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi; (b) berlakunya khiyar syarat, khiyar aib, atau khiyar rukyah, (c) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak; dan (d) tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hal ini para ulama fiqih menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu.
- e. Pihak yang melaksanakan akad, diantaranya akad sewa menyewa.³⁸

B. *Musaqoh*

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Musaqoh berasal dari bahasa arab مساقاة- ساقى- yang artinya memberi minum.³⁹ *Musaqoh* adalah kerjasama antara pemilik pohon dengan pemeliharanya dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya disepakati bersama.

³⁷ *Ibid.*, h. 90-192.

³⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 68.

³⁹ Atabik Ali Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak: 1996), h. 1037.

Musaqoh diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon *tamar*, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.⁴⁰

Musaqoh adalah suatu akad dengan memberikan pohon dengan penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi antara keduanya.⁴¹

Dalam pengertian syara' *musaqoh* adalah penyerahan pohon kepada orang yang menyiraminya dan menjanjikannya, bila sampai buah pohon masak dia kan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu.⁴²

Musaqoh menurut syara' yaitu kerjasama perawatan tanaman serta menyirami dan lain sebagainya, dengan perjanjian bagi hasil atas buah atau manfaatnya.⁴³

Musaqoh adalah akad (transaksi) antara pemilik kebun/tanaman pada masa tertentu sampai tanaman itu berubah.⁴⁴

Menurut Malikiyah, dalam buku fiqh sehari-hari karya Saleh Al-Fauzan sesuatu yang tumbuh ditanah terbagi menjadi lima macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berubah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
- b. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu keras, karet dan jati.
- c. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berubah dan dapat dipetik, seperti padi.
- d. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.

⁴⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 145.

⁴¹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 206.

⁴²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah XIII*, (Bandung:PT Alma'arif), h. 165.

⁴³*Ibid.*,

⁴⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Fiqh Muamalat), (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 280.

- e. Pohon-pohon yang diambil manfaatnya, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan ditempat lainnya.

Menurut Syafi'iyah, dalam buku *Fiqih Sehari-hari* karya Saleh Al-Fauzan yang dimaksud *musaqoh* ialah memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyirami, memelihara, dan menjaganya, sehingga pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan dari pohon-pohon tersebut.

Menurut Hanabilah, dalam buku *Fiqih Sehari-hari* karya Saleh Al-Fauzan *musaqoh* mencakup dua masalah berikut ini:

- a. Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma dan yang lainnya. Baginya, ada buah yang dapat dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiga atau setengahnya.
- b. Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada tanahnya, yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya, yang kedua ini disebut *munashabah mugharasah* karena pemilik menyerahkan tanah dan pohonnya untuk ditanamkannya.

Setelah mengetahui definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *musaqoh* ialah pemilik kebun memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya, dan penghasilan yang didapat dari kebun itu dibagi antara keduanya, menurut perjanjian keduanya sewaktu akad.⁴⁵

- a. Al-Qur'an

Musaqoh merupakan kerjasama bagi hasil antara pemilik tanah pertanian dengan penggarapnya, dengan demikian merupakan salah satu bentuk tolong-menolong. Dasar hukum yang bersumber dari al-Qur'an diantaranya adalah:

⁴⁵Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta:Gema Insani, 2006), h. 476.

Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 أَهْدَى وَلَا أَلْقَلَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن
 رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
 أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى
 الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hady, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Maidah (5):2)

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan pada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji prasetya hamba kepada Allah SWT maupun janji yang dibuat antara manusia seperti yang bertalian dengan perdagangan perkawinan dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah.

⁴⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung:Fitrah Rabbani, 2009), h. 106.

Adakalanya seorang pemilik kebun tidak juga tidak dapat mengelola kebunnya karena adanya kesibukan lain sehingga kebunnya itu menjadi terlantar. Sementara di sisi lain, tidak sedikit orang yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki lahan pertanian. Disinilah mereka dapat melakukan usaha bersama dalam pengelolaan lahan pertanian tersebut.⁴⁷

Dalam ayat lain Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفُقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِعَاطِلِينَ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S Al-baqarah(2):267)

Lalu para sahabat nabi setelah turun ayat ini berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan diantaranya. Talhah seorang hartawan dikalangan anshar datang kepada Nabi SAW memberikan sebidang kebun kurma yang sangat dicintainya untuk dinafkahkan di jalan Allah. Dijelaskan juga dalam AlQur'an Surat An-Nisa ayat 29

⁴⁷Suharsimi, *Fiqih Muamalah Lengkap*, (Jakarta:Gema Insani Pers, 2011), h. 120.

⁴⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung:Fitrah Rabbani, 2009), h. 45.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٤٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa:29)

Perkataan suka sama suka dalam ayat tersebut menjadi dasar bahwa jika melakukan transaksi harus merupakan kehendak diri sendiri tanpa tipu daya dan paksaan. Selain itu dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ﴿٥٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (Q.S Al-Baqarah (2):282)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hambanya di muka bumi yang melakukan kegiatan usaha kerjasama diantara kamu, hendaklah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerjasama.

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung:Fitrah Rabbani, 2009), h. 77.

⁵⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung:Fitrah Rabbani, 2009), h. 48.

Adapun kaitannya dengan jangka waktu kerjasama ini yaitu dijelaskan juga dalam Q.S Al-Qashash (28):28

قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ⁵¹

Dia (Musa) berkata: “Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan. (Q.S Al-Qashash (28):28)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam suatu perjanjian antara dua pihak baik itu dalam usaha atau sejenisnya harus memiliki jangka waktu yang ditentukan, maksudnya adalah dalam suatu perjanjian harus ada batasan waktu.

b. Al-Hadist

Akad ini di haruskan (diperbolehkan) oleh agama karena banyak yang membutuhkannya. Alasan lain yang mereka kemukakan adalah bahwa sebagian pemilik tanah perkebunan tidak mampu atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengolah sendiri perkebunanya. Selain itu ada sebagian orang yang memiliki kepakaran dalam perkebunan, tetapi ia tidak memiliki tanah untuk digarap. Agar tanah perkebunan orang-orang yang tidak mampu atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengolah kebunnya tidak terlantar, dan petani-petani tidak pula menganggur, maka adalah sangat terpuji jika antara kedua belah melakukan kerjasama untuk memproduksi tanah yang tidak terolah itu. Pada satu sisi pemilik tanah terbantu karena tanahnya tidak dibiarkan kosong, dipihak lain petani penggarap mendapat pekerjaan. Oleh sebab itu, kerjasama ini memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.⁵²

⁵¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung:Fitrah Rabbani, 2009), h. 56.

⁵²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), h. 283.

Ulama fiqh sepakat, bahwa tanaman yang diakadkan dalam *musaqoh* adalah tanaman yang usianya minimal satu tahun. Juga disyaratkan, bahwa jenis tanaman itu adalah tanaman keras.

Sebagai dasarnya yaitu hadist Rasulullah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرَطٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ زَرْعٍ . (رواه مسلم)⁵³

Ibnu Umar, Sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun beliau Dari kepada penduduk khaibar agar mereka pelihara dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan, maupun dari hasil tanaman (palawija). (H.R Muslim).

Jumhur ulama fiqh, termasuk Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, keduanya tokoh Hanafi, berpendirian bahwa akad *musaqoh* dibolehkan. Alasan kebolehan akad *musaqoh*, menurut mereka adalah sebuah hadist dari Abdullah ibn Umar yang sebagaimana telah disebutkan di atas

Seperti dalam hadist Rasulullah sebagai berikut:

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ أَنَّ الْأَنْصَارَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَقْسَمُ بَيْنَنَا وَبَيْنَا إِخْوَانًا تَحِيلَ قَالَ : لَا . فَقَالُوا : تَكْفُؤُنَا الْمُؤُونَةَ وَتُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ؟ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا (رواه البخار ي)⁵⁴

Al Bukhari meriwayatkan: bahwa orang Anshar pernah berkata kepada Nabi SAW. “Bagilah antara kami dan saudara-saudara kami kurma”. Rasulullah menjawab: “Tidak.” Lalu mereka berkata: “biarkan urusan pembiayaannya kepada kami, dan kami bersama-sama kamu bersekutu dalam memperoleh buah”. Mereka (Muhajirin) berkata: “kami dengar dan kami taati. (H.R Bukhari)

⁵³ Al-Imam Abi Husain Muslimbin al-Hijaji al-Qusairi an-Nai Sabury, *Shahih Muslim*, h. 1186.

⁵⁴ Al-Bukhori hadist n0 999, Dikutip dari Muhammad Fuad Abdul Baqi, *AL-lu lu' wal mar*, (Jakarta: Ummul Qura', Cet: 10, 2014), h. 745

Ini artinya, bahwa orang-orang anshar menginginkan melakukan kerjasama dengan orang-orang Muhajirin dalam mengelola pohon kurma, lalu mereka menyampaikan hal itu kepada Rasulullah, kemudian beliau tidak bersedia, lalu mereka mengajukan usul, bahwa merekalah yang mengelola persoalannya, dan mereka berhak sebagian hasilnya, lalu Rasulullah mengabulkan permohonan mereka.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ نَبِيَّ قُلٍّ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا،
أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكْرِهَا. (أخرجه البخارى و مسلم وان و
وي).⁵⁵

“Diriwayatkan dari jabir bin Abdullah bahwasanya nabi bersabda, “Siapa saja yang memiliki lahan, hendaknya ia mengolah dan menanaminya, atau biarkanlah saudaranya yang mengolah dan menanaminya, dan janganlah kalian menyewakan lahan pertaniannya.” (HR. Bukhari, Muslim, An-Nawawi)

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخَايِرُ، قُلٍّ عَمْرٌ وَ : فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا عَبْدِ
الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكَتَ هَذِهِ الْأُخْتَابِرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ
مُخَابِرَةِ، فَقُلَّ : أَيْ عَمْرُو أَخْبَرَ بَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ
أَنَّ النَّبِيَّ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا، إِنَّمَا قَالَ : يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ
يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَجًا مَعْلُومًا. (أخرجه مسلم، والنووي).⁵⁶

“Diriwayatkan dari Thawus bahwa ia seorang petani yang mengusahakan tanahnya dan memungut sebagian dari hasil tanaman yang ditanamnya (Mukhabarah). Amr, berkata, ‘lalu aku katakan kepadanya, ‘wahai Abu Abdurrahman, andai saja engkau meninggalkan mukhabarah, karena orang-orang meyakini bahwa Nabi telah melarang mukhabarah.’ Lantas Thawus berkata, wahai Amr, orang yang lebih tau tentang itu telah

⁵⁵AL-Hafidz Dzaqiyuddin Abdul Adzim bin Abdul Qawi Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Surakarta: Insan Kamil, 2012), h. 477.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 479.

menceritakan kepadaku, yaitu Ibnu Abbas, bahwa nabi tidak melarang mukhabarah itu hanya saja beliau bersabda, ‘Seseorang membuat manfaat kepada saudaranya lebih baik dari pada ia mengambil manfaat saudaranya itu dengan upah tertentu.’ (HR. Muslim, An-Nawawi)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ عَامِلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ فَكَانَ يُعْطَى أَزْوَاجَهُ مَا عَاءٌ وَسُقُوعٌ. (رواهما لبخاري)⁵⁷

“Dari ‘Abdullah bin ‘Umar Ra: Nabi SAW mendatangi perjanjian dengan penduduk khaibar untuk memanfaatkan lahan dengan syarat bahwa separuh dari hasil lahan itu berupa sayuran dan buah-buahan akan menjadi bagian mereka. Beliau membeli istri-istrinya masing-masing 100 wasq, yakni 80 wasq kurma dan 20 wasq gandum.” (HR. Shahih Al-Bukhari)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ لَمْ يَنْهَ عَنِ الْكِرَاءِ وَلَكِنْ قَالَ : أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرَ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجٌ جَائِزٌ مَعْلُومًا. (رواهما لبخاري)⁵⁸

“Dari Ibn ‘Abbas Ra: Nabi SAW tidak melarang hal itu (yakni, sistem bagi-hasil), melainkan bersabda, “Akan lebih baik dan lebih bermanfaat seseorang memberikan lahannya kepada saudaranya ketimbang meminta ia membayar uang sewa selama kurun waktu tertentu.” (HR. Shahih Al-Bukhari).

عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَمَّا يَأْتِي أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْبَعَاءِ أَوْ شَيْءٍ يَسْتَشْتِيهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ، فَتَهَى إِيَّاهُ

⁵⁷ Imam Zainuddin az-Zubaidi, Mukhtashar Shahih Al-Bukhari, (Bandung: Penerbit Marja, 2018), h. 403.

⁵⁸ Ibid.,

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَلِكَ. فَقُلْتُ لِرَافِعٍ : فَكَيْفَ هِيَ بِأَلَدَيْنَارٍ وَالذَّرَّ هَمْ؟ فَقَالَ رَفِيعٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالذَّيْنَارِ وَادَّرْهُمْ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁵⁹

“Dari Hanzalah bin Qais dari Rafi’ bin Khadij, dia berkata, pamanku telah menceritakan kepadaku bahawasanya mereka menyewakan tanah pada zaman nabi dengan apa yang tumbuh dari saluran-saluran air atau sesuatu yang telah dikecualikan pemilik tanah, kemudian Nabi SAW melarang hal itu. Aku bertanya kepada Rafi’, bagaimana bila dengan dinar dan dirham?, maka Rafi’ menjawab, tidak mengapa menyewa tanah dengan dinar dan dirham”. (Terjemahan H.R. Bukhari)

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْسَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِى لَأَرْضٍ عَلَى أَنْ لَنَا هَدٍ هِرٌّ فَرُبَّمَا آخَرَ جَثَّ هَدِيهِ وَلَمْ نُخْرِجْ هَدِيهِ فَتَنَاهَا نَا عَنْ ذَلِكَ (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ)⁶⁰

“Dari jalan Rafi’ bin Khadij, ia berkata: ”Kami kebanyakan pemilik tanah di Madinah melakukan muzara’ah, kami menyewakan tanah, satu bagian daripadanya ditentukan untuk pemilik tanah maka kadang-kadang pemilik tanah itu ditimpa suatu musibah sedang tanah yang lain selamat, dan kadang-kadang tanah yang lain itu ditimpa suatu musibah, sedang dia selamat, oleh karenanya kami dilarang”. (H.R. Muslim)

c. Ijma

Kebolehan *musaqoh* juga didasarkan atas *ijma’* (kesepakatan para ulama fiqh), karena itu sudah merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi keperluan hidup mereka.

⁵⁹ Muhammad Bin Isma’il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, No. 2346, Juz. III (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), h. 108.

⁶⁰ Muslim Bin Hajjaj Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz. III, No. 1547 (Mesir: Mathba’ah al-Mishr, 1930), h. 1183.

Telah berkata Abu ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib r.a bahwa Rasulullah SAW. Telah menjadikan penduduk khaibar sebagai penggarap dan pemelihara atas dasar bagi hasil. Hal ini dilanjutkan oleh Abu bakar, Umar, Ali, serta keluarga-keluarga mereka sampai hari ini dengan rasio 1/3 dan 1/4. Semua telah dilakukan oleh Khulafa ar-rasyidin pada zaman pemerintahannya dan semua pihak telah mengetahuinya, tetapi tak ada seorang pun yang menyanggahnya. Berarti, ini adalah suatu ijma' sukuti (konsensus) dari umat.⁶¹

Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah dan tanaman kurma di khaibar kepada yahudi khaibar untuk dipelihara dengan menggunakan peralatan dan dana mereka sebagai imbalan, mereka memperoleh persentase tertentu dari hasil panen.⁶²

Sedangkan beberapa pendapat para ulama berbeda dalam masalah yang diperbolehkan dalam *musaqoh*, yaitu:

- 1) Imam Abu Dawud, dalam buku Fiqih Muamalah karya Hendi Suhendi bahwa yang boleh di *musaqohkan* hanya kurma.
- 2) Abdurahman Al-jaziri, dalam buku Fiqih Muamalah karya Hendi Suhendi akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.
- 3) Menurut Syafi'iyah, dalam buku Fiqih Muamalah karya Hendi Suhendi yang boleh di *musaqohkan* hanyalah kurma dan anggur saja, karena sering kali dipasangkan dalam berbagai hukum, diantaranya kewajiban zakat untuk keduanya secara khusus dari berbagai buah-buahan. Mereka ini tidak mau memberlakukan semua pohon, yang dapat diambil manfaatnya, karena hukum inilah yang ditetapkan dalam penggambaran (hadits), karena hal itu dianggap bertentangan dengan dasar

⁶¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Praktik*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), h. 100

⁶²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana Prenandamedia Group, 2012), h. 243

hukum, sehingga tidak boleh keluar dari nash yang disebutkan.

- 4) Menurut Hanafiyah, dalam buku Fiqih Muamalah karya Hendi Suhendi semua pohon yang mempunyai akar kedaras bumi dapat di *musaqohkan*, seperti tebu.
- 5) Menurut Imam Malik, dalam buku Fiqih Muamalah karya Hendi Suhendi *musaqoh* dibolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun, dan pohon-pohon yang serupa dengan itu dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang berakar tidak kuat, seperti semangka dalam keadaan pemilik tidak lagi memiliki kemampuan untuk menggarapnya.
- 6) Menurut mazhab Hanbali, dalam buku Fiqih Muamalah karya Hendi Suhendi *musaqoh* diperbolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan, dalam kitab al-Munghni, Imam Malik berkata, *musaqoh* diperbolehkan untuk pohon tadah hujan dan diperbolehkan pula untuk pohon-pohon yang perlu disirami.
- 7) Hasbi As-Shiddiqie dalam buku Fiqih Muamalah karya Hendi Suhendi mengartikan *musaqoh* adalah mempergunakan buruh (orang upahan) untuk menyirami tanaman, menjaga, memelihara, dengan memperoleh upah dari hasil yang diperoleh dari tanaman itu.
- 8) Tentang *musaqoh*, Abu Hanifah dalam buku Fiqih Muamalah karya Hendi Suhendi berpendapat bahwa ia tidak boleh, bagaimana pun keadaannya, oleh karena itu sama dengan sewa-menyewa dengan buah yang belum ada atau buah yang belum diketahui, yang berarti mengelola buah yang belum tampak kematangannya atau kembali kepada ketidakjelasan hasilnya, yang keduanya sama-sama dilarang. Karena itu dia menyebutkan nash, yang dianggapnya bertentangan dengan dasar hukum ini. Sedangkan golongan Zhahiriyah berpendapat, bahwa *musaqoh* tidak diperbolehkan kecuali hanya untuk pohon kurma, karena memang hanya pohon kurma itulah yang disebutkan.

- 9) Al-Imam Ahmad, dalam buku *Fiqih Muamalah* karya Hendi Suhendi membolehkan *musaqoh* untuk semua buah-buahan yang dapat dimakan. Bahkan sebagian rekannya juga membolehkannya untuk semua pohon yang mempunyai daun dan bunga yang diambil dari manfaatnya.⁶³

Kebenaran yang tidak dapat disangkal, bahwa hukum ini mencakup segala pohon yang dapat diambil manfaatnya, karena hadits ini menyebutkan buah-buahan, yang berarti bersifat umum untuk semua jenis buah-buahan.

2. Rukun dan Syarat

Rukun *musaqoh* ada lima macam, yaitu para pihak yang mengadakan akad, objek pekerjaan, buah, tugas pekerjaan, dan sighat.⁶⁴ Ulama Mazhab Hanafi menyatakan, bahwa rukun *musaqoh* hanya ada dua saja, yaitu ijab dan kabul (penyerahan dan penerimaan).⁶⁵ Jumhur Ulama (Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali) menyatakan, bahwa rukun *musaqoh* ada lima:⁶⁶

- a. Ada dua orang (pihak) yang mengadakan akad (transaksi).
- b. Objek *musaqoh* menurut ulama Hanafiyah adalah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma.
- c. Ada lahan yang dijadikan obyek dalam perjanjian.
- d. Yang bekerja (penggarap) dengan pemilik kebun keduanya hendaklah orang yang sama-sama berhak membelanjakan harta keduanya.
- e. Bentuk/jenis usaha yang akan dilakukan.
- f. Ada ketentuan bagian masing-masing dari hasil kerja sama itu.
- g. Ada perjanjian, baik tertulis maupun lisan (sighat).

Kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi pada masing-masing rukun adalah:⁶⁷

⁶³Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 208-210

⁶⁴Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i 2 (Mengpas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist)*, Cet , (Jakarta:Almahira, 2010), h. 290.

⁶⁵M. Ali Hasan, h. 282.

⁶⁶*Ibid.*, h. 282.

⁶⁷*Ibid.*, h. 282-283.

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum (baligh dan berakal).
- b. Pohon atau tanaman yang dipelihara hendaknya jelas, dapat diketahui dengan mata atau dengan sifatnya karena tidak sah barang yang tidak diketahui.
- c. Benda yang dijadikan obyek perjanjian bersifat pasti. Menurut Mazhab Syafi'i kebun yang menjadi obyek perjanjian adalah anggur dan kurma saja, karena kedua macam tanaman tersebut yang dinyatakan dalam hadits Rasulullah. Berbeda dengan Mazhab Hanbali bahwa semua macam tanaman yang dapat dimakan buahnya dapat dijadikan obyek perjanjian.
- d. Bagian penggarap hendaknya jelas apakah separuh, sepertiga, dan seterusnya.
- e. Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun tersebut merupakan hak kerjasama dan pembagiannya juga sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.
- f. Bentuk usaha yang dilakukan oleh pengelola harus ada kaitannya dengan usaha untuk mengelola dan merwat kebun tersebut, agar memperoleh hasil yang maksimal. Dengan demikian akan menguntungkan kedua belah pihak.
- g. Ada kesediaan masing-masing pihak untuk melakukan perjanjian, tertulis atau lisan.
Selanjutnya syarat-syarat benda yang akan diadakan adalah:⁶⁸
 - a. Tanaman yang dijadikan objek obyek perjanjian itu, harus diketahui secara pasti dan disebutkan dalam perjanjian.
 - b. Lama perjanjian itu harus jelas. Namun, menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, penetapan jangka waktu bukanlah merupakan suatu keharusan dalam *musaqoh*, walaupun hal itu memang dipandang amat baik. Sebab, musim berubah sewaktu-waktu juga berubah dari kebiasaan. Bahkan menurut ulama Mazhab Hanafi bila tidak ditentukan jangka waktunya malah lebih baik (istihsan)

⁶⁸*Ibid.*, h. 283.

karena musim berubah suatu tanaman berbeda setiap tahunnya.

- c. Perjanjian *musaqoh* hanya dapat dilakukan sebelum berbuah atau buahnya sudah ada, tetapi belum matang.
- d. Ada ketentuan yang pasti tentang pembagian pengelola. Persentasenya harus jelas untuk masing-masing pihak.

Dengan demikian tidak sah akad itu, apabila mencantumkan bagian pengelola saja atau pemilik lahan (kebun).

Menurut ulama Hanabilah, dalam buku Fiqih Muamalah Karya Nasrun Haroen yang boleh dijadikan obyek *musaqoh* adalah terhadap tanaman yang buahnya boleh dikonsumsi, oleh sebab itu *musaqoh* tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki buah.⁶⁹

3. Hikmah *Musaqoh*

Memberikan kesempatan pada orang lain untuk bekerja dan menikmati hasil kerjanya, sesuai dengan yang dikerjakan. Sementara itu, pemilik kebun /tanah garapan memberikan kesempatan kerja dan meringankan kerja bagi dirinya.

Islam mensyari'atkan dan membolehkan keringanan kepada manusia. Terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan untuk memproduktifkannya. Dan terkadang ada pula orang tidak memiliki harta, tetapi mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, syari'at membolehkan *mumalah*, ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya. Pemilik harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman *mudharib* (orang yang diberi modal), sehingga *mudharib* dapat memperoleh manfaat dengan harta (sebagai modal), dengan demikian terciptalah kerjasama antara modal dan kerjasama. Dan Allah tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terbandungnya kesulitan.

⁶⁹Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), h. 284.

Hikmah dari kebolehan kerjasama dalam bentuk ini adalah tolong-menolong dan kemudahan dalam pergaulan hidup, saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Kerja sama bagi hasil perkebunan mengandung hikmah yang besar bagi masyarakat, karena memupuk terhadap individu agar selalu memiliki sifat tolong menolong, seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-A'Raaf ayat 157 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَهُمْ لَهُمْ الْطِّبَتِ وَمُحَرَّمٌ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثُ وَيَضَعُ
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ
وَعَزَّزُوا وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ﴿٧٠﴾

(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung. (Q.S Al-A'Raaf (7) : 157).

Ayat tersebut menunjukkan bukti-bukti konkrit bahwa syari'at Islam senantiasa menginginkan hilangnya kesulitan dari

⁷⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung:Fitrah Rabbani, 2009), h. 151.

umatnya. Bahwa dalam hukum-hukum syari'at tidak akan pernah didapati suatu tuntutan yang melewati batas kemampuan hambanya. Dalil-dalil tersebut juga mengindikasikan bahwa Allah memberlakukan hukum-hukumnya (yang termuat dalam syari'at islam), pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan pada hambanya.

4. Berakhirnya *Musaqoh*

- a. Habis waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang akad

Jika waktu telah habis, tetapi belum menghasilkan apa-apa, penggarap boleh berhenti. Akan tetapi, jika penggarap meneruskan bekerja diluar waktu yang telah disepakati, ia tidak mendapatkan upah.

- b. Meninggalnya salah seorang yang akad

Jika penggarap meninggal, ahli warisnya berkewajiban meneruskan *musaqoh*, walaupun pemilik tanah tidak rela. Begitu pula jika pemilik meninggal, penggarap meneruskan pemeliharaannya walaupun ahli waris pemilik tidak menghendakinya. Apabila kedua orang yang berakad meninggal, yang paling berhak meneruskan adalah ahli waris penggarap. Jika ahli waris itu menolak, *musaqoh* diserahkan kepada pemilik tanah.

- c. Membatalkan, baik dengan ucapan secara jelas atau adanya uzur

Diantara yang dapat membatalkan *musaqoh*:

- a. Penggarap dikenal sebagai pencuri yang dikhawatirkan akan mencuri buah-buahan yang digarapnya.
- b. Penggarap sakit sehingga tidak dapat bekerja.⁷¹

C. Penyadapan Pohon Karet

Penyadapan pohon karet merupakan salah satu langkah penting dalam budidaya karet. Pada dasarnya penyadapan adalah orang yang melakukan kegiatan berupa pemutusan atau pelukaan pembuluh pohon karet untuk mengeluarkan lateks yang akan dialirkan kewadah penampungan yang dipasang pada batang pohon

⁷¹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), h. 219

karet agar lateks yang terdapat di dalam tanaman karet keluar. Tanaman karet mulai dapat disadap pada umur 5-6 tahun, lilit batang 45 cm dengan ketinggian 100 cm di atas permukaan tanah dengan arah dari kiri atas ke kanan bawah dengan sudut kemiringan 45. Kedalaman irisan sadap 1-1,5 mm dari cambium dengan ketebalan 1,5-2 mm dengan frekuensi penyadapan setiap hari dalam seminggu, letak pemasangan talang adalah 15cm dari titi sudut kemiringan irisan sadap (ujung irisan rendah). Letak pemasangan mangkok 10cm di bawah talan. Waktu penyadapan yang dianjurkan mulai jam 06.00 WIB dan selesai tidak lebih dari jam 10.00 WIB.

Pengumpulan lateks dilaksanakan 3-4 jam setelah penyadapan dilakukan. Lateks dari mangkok di tuangkan kedalam ember pengumpul dengan menggunakan spatel yang kemudian dibawa ke TPH (Tempat pengumpulan Hasil), kemudian untuk membersihkan lateks dalam mangkok harus menggunakan spatel, jangan sekali-kali menggunakan kain, rumput-rumputan atau daun kering. Bila lateks dalam ember pengumpul sudah terkumpul banyak, lateks dipindahkan ke dalam kotak yang ukurannya lebih besar. Waktu menuangkan lateks dari ember pengumpul harus dituangkan secara perlahan-lahan untuk menghindari terjadinya prakoagulasi (Mengumpul/membeku). Lateks yang telah dikumpul kemudian ditimbang agar diketahui beratnya.⁷²

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka mengungkapkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Selain itu, penelitian yang terdahulu dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian itu sehingga terjadi penelitian yang saling terkait.:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ferinda Tiaranisa (1421030340) dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi kasus pada cucian mobil kusuma utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adi Luwih Kabupaten Pringsewu).

⁷²Didit Heru Setiawan, *Petunjuk Lengkap Budidaya Karet*, (Jakarta:Argo Media Pustaka, 2005), h. 1

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah Dalam Pelaksanaan Cucian Mobil Kusuma Utama Ini pemilik melakukan kerjasama dengan cara memberi modal dan kepercayaan kepada pengelola untuk mengelola cucian mobil dengan modal sepenuhnya dari pemilik cucian mobil yang diserahkan kepada pengelola dan hasil dibagi dua dari pemilik dan pengelola. Praktek kerjasama antara pihak pemilik dan pengelola bahwa hasil yang didapat dikurangi modal dan sisa dari keuntungan, barulah dibagi pemilik 50% dan pengelola 50%.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ratih Apriliana Dewi (1321030019) dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi (Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara).

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah praktik musaqoh atau kerjasama bagi hasil perkebunan kopi dilakukan antara pemilik dan penggarap/pengelola kebun kopi dilakukan secara lisan (tidak tertulis) dan tanpa saksi hanya didasari saling percaya, sedangkan batasan waktunya tidak ditentukan dalam praktiknya ada yang 2 sampai 7 tahun. Mengenai pembagian hasil dibagi 2 atau bisa juga dari hasil panen, tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak.⁷³

3. Skripsi yang ditulis oleh Melinda (1521030143) dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola (Studi Pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung).

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah dalam penerapannya terdapat penyimpangan dari ketentuan perjanjian awal. Adapun persentase bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola yaitu 60% untuk pemilik modal dan 40% untuk pengelola. Namun persentase hasil tersebut tidak berubah,

⁷³Ratih Apriliana Dewi, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi”* Di Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Kabupaten Lampung Utara, 2017.

walaupun kewajiban membayar gaji dan sewa bangunan telah berpindah kepada pihak pengelola.⁷⁴

Dari beberapa karya ilmiah yang ada, setelah peneliti mengamati dan menelusurinya, terdapat persamaan maupun perbedaan dengan apa yang penulis teliti sebagai karya tulis skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun Dan Pekerja Sadap Karet yaitu persamaannya adalah sama-sama membahas masalah bagi hasil pemilik dengan pengelola, sedangkan perbedaannya yaitu objeknya berbeda.



⁷⁴Melinda, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Dengan Pengelola”* di Toko Wanti Pasar Panjang, Bandar Lmapung, 2019.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Al-Bukhori Hadis No. 999, Dikutip dari Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'Lu' Wal Marjan*, Jakarta: Ummul Qura', Cet: 10, 2014.

AL-Hafidz Dzaqiyuddin Abdul Adzim bin Abdul Qawi Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, Surakarta: Insan Kamil, 2012.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Fitrah Rabbani, 2009.

Imam Abdillah Muhammad Ibn Ibrohim Ibn Mukhiroh Ibn Barzabah Al-Bukhori Al-Ju'fi AL-Mutafasannah, *Shohihul Bukhori*, Darul Al-Khutub Al-Ilmiyah Libanon: Bairut, 2004.

Imam Zainuddin az-Zubaidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, Bandung: Penerbit Marja, 2018.

Muhammad Bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, No. 2346, Juz. III Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.

Muslim Bin Hajjaj Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz III, No.1547, Mesir: Mathba'ah Al-Mishr, 1930.

B. Buku

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010.

AbdulHaq, Zinal *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Pustaka Amani, 2002.

Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta : Darul Haq, 2008.

Al-Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Perss, 2001.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013.

Atabik Ali Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak : 1996,

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adilatuhu*, Beirut : Daar Al-Fikr, 1984.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Didit Heru Setiawan, *Petunjuk Lengkap Budidaya Karet*, Jakarta : Argo Media Pustaka, 2005.

Eka Nuraini Rachmawati & Nab Mumin Bin Ab Ghani, *Akad Jual Beli dalam Perspektif Fiqih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, Desember, 2015.

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

Haroen, Nasrun *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Grafindo Persada Pratama, 2007.

Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, 2016.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Fiqih Muamalah Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2012.

Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2015.

Mas'adi, Ghufroon, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

Muhammad Aziz Hakim, *Cara Praktis Memahami Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1996.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001.

Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i 2, *Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, Jakarta : Almahira, 2010.

Ru'fah *Fiqih Muamalah*, Bogor: PT Raja Grafindo Persada, 1979.

Ruslan Abdul Ghofur, "Akibat Hukum dan Terminasi Akad dalam Fiqih Muamalah", *Jurnal ASAS*, Vol. 2, No. 2 Juli 2010.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah XIII*, Bandung : PT Alma'arif, 2001.

Sahari, Sohari, *Fiqih Muamalah*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.

Suharsimi, *Fiqih Muamalah Lengkap*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2011

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung : Pusat Penelitian dan Penertbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2001.

Syarifudin, Amir *Ushul Fiqih Jilid 1*, Jakarta : Wacana Ilmu, 1997.

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih*, Jakarta : Bulan Bintang, 1992.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999.

C. Wawancara

Aminudin, Pekerja Sadap Karet, Desa Trikarya, 7 November 2020.

Jito, Pekerja Sadap Karet, Desa Trikarya, 7 November 2020.

Kirwan, Pekerja Sadap Karet, Desa Trikarya, 7 November 2020.

Mohaji, Pekerja Sadap Karet, Desa Trikarya, 7 November 2020.

Suwarto, Pemilik Kebun Karet, Desa Trikarya, 7 November 2020.

Wakidi, Pemilik Kebun Karet, Desa Trikarya, 7 November 2020.

D. Online

<http://alienariez.blogspot.co.id/2013/06/hak-dan-kewajiban-pihak-yang-berakad.html> (26 September 2020).

